



TESIS

Judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Pasca
Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam
Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020)**

Disusun oleh:

YOSEPHINE EFFENDY

NIM. 217211013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Pasca
Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam
Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

YOSEPHINE EFFENDY

NIM. 217211013

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Persetujuan

Nama : YOSEPHINE EFFENDY
NIM : 217211013
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris
Pasca Dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Pidana
(Studi Putusan Nomor 20 PK/PID/2020)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Desember-2022

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Pengesahan

Nama : YOSEPHINE EFFENDY
NIM : 217211013
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Pasca Dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 20 PK/PID/2020)
Title : Legal Protection for Notary Office After Being Released from All Lawsuits in Criminal Cases (Study of Decision Number 20 PK/PID/2020)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 25-Januari-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat mengatasi segala kendala untuk menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Pasca Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 20 PK/PID/2020). Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar magister kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari banyak pihak selama proses penulisan sehingga dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih khusus dihaturkan kepada:

1. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S2 Magister Kenotariatan.
4. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang tidak pernah lelah dalam membimbing, memberi pengetahuan, solusi permasalahan dan waktunya untuk penulis selama proses bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepada kedua orangtua penulis yang selama ini telah memberikan semangat, kasih sayang yang tidak putus-putus, bimbingan dan dorongan baik secara moral maupun materiil;
7. Kepada suami tercinta yang telah selalu mendorong dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Studi Program Kenotariatan, serta anak-anakku yang selalu menyemangati dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Kepada semua teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan di masa-masa perkuliahan yang telah memberikan semangat sehingga saya termotivasi menyelesaikan tesis ini;

Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk informasi untuk pengembangan Ilmu Hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya di kalangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan masyarakat luas pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari penguji dalam penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan-kesalahan di dalam

Penulisan Tesis ini, baik dalam hal materi maupun dalam teknis Penulisan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam membantu pembuatan Tesis ini.

Jakarta, 31 Desember 2022

Yosephine Effendy

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoretis.....	18
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Notaris dan Kewenangannya	35
1. Dasar Hukum Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesa..	35
2. Tugas, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan	42
B. Tinjauan Tentang Kuasa Menjual di Hadapan Notaris	52
C. Tinjauan Tentang Kriminalisasi Notaris.....	59
D. Perjanjian	62
1. Dasar Hukum Perjanjian.....	62
2. Syarat Sah Perjanjian.....	64

E. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	68
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	
A. Putusan Pidana Notaris Atas Pengembangan Kasus Pidana Lain Yang Menyeret Notaris Dalam Kasus Hukum.....	72
1. Putusan Pidana Notaris KNA Perkara Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps	75
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps.....	83
3. Alasan Banding, Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding Perkara Nomor 27/Pid/2019/PTDPS	97
4. Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Peninjauan Kembali Perkara Nomor 20 PK/Pid/2020	114
B. Data Hasil Wawancara	122
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Pasca Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana	131
B. Bentuk Pemulihan Hak-Hak Notaris Pasca Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020.....	145

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	154
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Pasca Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 20 PK/PID/2020)

Nama Mahasiswa : Yosephine Effendy

Nim : 217211013

Kata Kunci : Perlindungan hukum, notaris, lepas dari segala tuntutan pidana

Isi Abstrak :

Dalam praktik kenotariatan notaris dapat saja diperkarakan oleh para pihak secara perdata maupun pidana karena kesalahan dan kelalaiannya. Bahkan ditemukan pula notaris yang ditetapkan menjadi tersangka akibat dari pengembangan kasus tindak pidana lain yang dilakukan oleh penyidik kepolisian karena kasus pidana yang ditangani ada kaitannya dengan akta yang telah dibuat notaris seperti dalam kasus Notaris KNA, perkara No.20 PK/Pid/2020 yang memutus lepas dari segala tuntutan pidana yang sebelumnya pada tingkat pertama dan banding dinyatakan bersalah “sengaja memberi kesempatan atau sarana dalam tindak pidana penipuan”. Timbul permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap jabatan notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara pidana? dan bagaimana bentuk pemulihan hak-hak notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020? Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil analisis menyimpulkan bahwa dalam UUJN belum mengatur perlindungan hukum terhadap jabatan notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara pidana meskipun dalam konsideran huruf c UUJN menegakkan dalam menjalankan profesinya notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum agar terlepas dari perkara pidana, notaris harus menjalankan tugas-tugasnya dengan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Belum diaturnya bentuk pemulihan hak-hak notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sehingga bentuk pemulihannya tetap merujuk pada hukum acara pidana (KUHP) berupa pemulihan hak, penggantian ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik.

Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

DAFTAR SINGKATAN

KEMENKUMHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	Mahkamah Agung
MKN	Majelis Kehormatan Notaris
PJN	Peraturan Jabatan Notaris
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PK	Peninjauan Kembali
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
UUJN	Undang-Undang Jabatan Notaris